



JURNAL MANAJEMEN

Open access available at <http://ejournal.lmiimedan.net>



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Karo)

Emiya Sri Hagana Br Brahmana, Arthur Simanjuntak, Mitha Christina Ginting
Universitas Methodist Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Mei 2022

Disetujui Juni 2022

Dipublikasikan Juni 2022

Keywords:

Sumber Daya Manusia;
Komitmen Organisasi;
Penyempurnaan Sistem
Administrasi Terhadap
Kualitas Penyusunan
Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan penyempurnaan sistem administrasi terhadap kualitas penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Karo). Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 48 orang. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian diperoleh bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, dengan diperoleh nilai $t_{hitung} (2.713) > \text{nilai } t_{tabel} (2.015)$ atau nilai signifikansi $t (0.009)$ lebih kecil $< \alpha (0.05)$. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, dengan diperoleh nilai $t_{hitung} (3.429) > \text{nilai } t_{tabel} (2.015)$ atau nilai signifikansi $t (0.001)$ lebih kecil $< \alpha (0.05)$. Penyempurnaan sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, dengan diperoleh nilai $t_{hitung} (2.955) > \text{nilai } t_{tabel} (2.015)$ atau nilai signifikansi $t (0.005)$ lebih kecil $< \alpha (0.05)$. Sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan penyempurnaan sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, dengan diperoleh nilai $F_{hitung} (20.477) > \text{nilai } F_{tabel}$ sebesar 2.820 atau nilai signifikansi $F (0.000) < \text{nilai } \alpha (0.05)$.

PENDAHULUAN

Suatu pemerintah daerah dapat memperoleh penerimaan dan pengeluaran dalam menjalankan pemerintahan. Kedua hal tersebut akan disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan disesuaikan dengan keperluan suatu daerah dan kemampuan pendapatan yang dihasilkan dari daerah tersebut. Jika semakin besar keperluan atau kebutuhan suatu daerah, maka semakin besar pula pengeluaran daerah, sehingga dengan adanya pendapatan yang maksimal diperoleh dari daerah tersebut tentunya akan

membantu dalam mengatasi pengeluaran tanpa harus melibatkan bantuan dari pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 17 ayat 3 bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 pada Pasal 17 ayat 4 bahwa dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam penggunaannya agar berjalan efisien maupun efektif dapat ditinjau dari kebijakan dalam bidang keuangan daerah berupa kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Oleh karena itu pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam mengelola keuangan daerah, yaitu melakukan pengelolaan dana secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta mampu melakukan sinkronisasi atas pencapaian program daerah dalam APBD dengan program yang dimiliki pemerintah (Siahaan & Simanjuntak, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan APBD sangat penting untuk dilakukan agar dalam penggunaannya tepat sasaran. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyusunan APBD adalah sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan penyempurnaan sistem administrasi. Sumber daya manusia atau disebut sebagai aparatur pemerintah daerah memiliki tugas untuk mengelola maupun memastikan seluruh kepentingan daerah dapat terpenuhi maupun tepat sasaran (Simanjuntak et al., 2020). Hal tersebut dapat terwujud karena adanya kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan aparatur daerah atau negara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 bahwa reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Zaenuri (2015) mengemukakan bahwa kebijakan pengelolaan aparatur disusun untuk mewujudkan aparatur sipil daerah maupun negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil penelitian dari Ismid, dkk (2020) bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas penyusunan APBD adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi dalam pemerintah daerah sangat penting untuk dimiliki, karena melalui komitmen seluruh kebijakan maupun aturan dapat dipatuhi maupun dilaksanakan secara bersama-sama, saling bersinergi dalam membangun daerah yang dipimpin, dan lainnya. Menurut Harahap dan Syardiansah (2021) komitmen organisasi adalah sebagai suatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang pasif terhadap organisasi. Komitmen organisasi menyiratkan hubungan pegawai dengan organisasi secara aktif karena pegawai yang dapat menunjukkan komitmen tinggi mempunyai keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab lebih untuk keberhasilan organisasi. Dari hasil penelitian tersebut juga ditemukan komitmen

organisasi menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas penyusunan APBD. Penyempurnaan sistem administrasi juga dapat mempengaruhi kualitas penyusunan APBD. Penyempurnaan sistem administrasi berguna meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses administrasi yang dilakukan oleh aparatur daerah. Jika penyempurnaan sistem administrasi tidak dilakukan secara berkala akan menimbulkan kekeliruan atau membuat dokumen tidak tersusun dengan baik. Menurut Rasyid, dkk (2017) penyempurnaan administrasi merupakan perbaikan atas kesalahan, penambahan atas kekurangan, serta pengurangan atas overtitivitas administrasi. Oleh karena itu, penyempurnaan administrasi perlu dan harus bagi setiap organisasi agar sistem dan prosedur mampu untuk memaksimalkan kinerja organisasi. Menurut Deliana & Nasution dalam Ismid, dkk (2020) bahwa penyempurnaan sistem merupakan suatu target kinerja, pengukuran kinerja, analisis kinerja, standar pelayanan minimal dan standar biaya. Apabila penyempurnaan sistem administrasi baik atau tinggi akan dapat berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja yang baik atau tinggi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Karo).
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Karo).
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh penyempurnaan sistem administrasi terhadap kualitas penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Karo).
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan penyempurnaan sistem administrasi terhadap kualitas penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Karo).

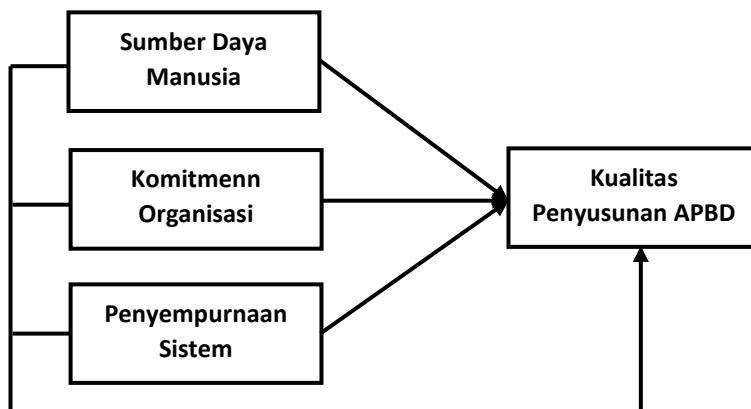
TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Zulkarnaim (2016) bahwa sumber daya manusia merupakan faktor rasional yang mengukur sejauh mana organisasi memiliki sumber daya yang relevan untuk efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja. Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran karena SDM selalu terkait dari penetapan sasaran hingga evaluasi.

Menurut Rasyid, dkk., (2017) komitmen organisasi adalah modal untuk membangun organisasi yang baik. Karena dengan adanya komitmen melahirkan kebulatan tekad dalam menggapai sesuatu termasuk optimalisasi terhadap anggaran. Menurut Rasyid, dkk., (2017) bahwa penyempurnaan administrasi merupakan perbaikan atas kesalahan, penambahan atas kekurangan dan pengurangan atas overtitivitas administrasi.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2018) bahwa untuk periode saat ini pemerintah sudah berusaha dalam menerapkan pendekatan penyusunan anggaran yang sesuai dengan konsep *New Public Management* (NPM), yaitu anggaran berbasis kinerja

(*performance-based budgeting*), kerangka pengeluaran jangka menengah, dan anggaran terpadu (*unified budget*).



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode asosiatif. Metode asosiatif digunakan untuk menguji atau mengetahui ada atau tidak ada pengaruh atau hubungan dari dua variabel atau lebih (Situmorang & Simanjuntak, 2019). Populasi penelitian ini menggunakan pegawai BKAD dan BAPPENDA Kabupaten Karo sebanyak 48 orang. Jenis data menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner, dokumentasi, dan pustaka (Situmorang & Simanjuntak, 2021).

Definisi operasional penelitian pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Definisi Operasional

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Sumber Daya Manusia (X ₁)	Sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan pada sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana dalam mencapai tujuan organisasi (Kurniawati, 2021).	1. Pengalaman kerja dan keahlian 2. Keterampilan 3. Pendidikan dan pelatihan	Likert
Komitmen Organisasi (X ₂)	Sikap loyalitas karyawan terhadap organisasi, dengan cara tetap bertahan dalam organisasi, membantu dalam mencapai tujuan organisasi dan tidak mempunyai keinginan untuk meninggalkan organisasi dengan alasan apapun (Yusuf & Syarif, 2018).	1. Visi dan misi 2. Sasaran 3. Tujuan 4. Strategi dalam mencapai keberhasilan tugas pokok dan fungsi organisasi	Likert
Penyempurnaan Sistem Administrasi	Suatu usaha sadar dan terencana dalam mengubah struktur dan prosedur	1. Analisis klasifikasi belanja	Likert

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala
(X ₃)	birokrasi serta sikap dan perilaku birokrat guna meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional (Karmanis & Karjono, 2020).	2. Pengukuran kerja 3. Target kinerja 4. Standar pelayanan minimal 5. Standar biaya	
Kualitas Penyusunan APBD (Y)	Kualitas penyusunan APBD merupakan kegiatan yang dilakukan secara normatif Kebijakan Umum Anggaran (KUA) – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan diakhiri dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD melalui sidang pleno DPRD yang bersangkutan (Siagian, 2021)	1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Transparansi 4. Akuntabel	Likert

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, dengan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

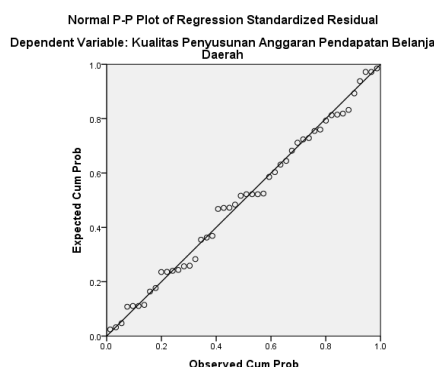
Karakteristik Responden

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Bagian Organisasi

Bagian Organisasi	Jumlah	Persentase
BKAD	25 Orang	52.08%
BAPPENDA	23 Orang	47.92%
Total	48 Orang	100%

Jumlah pegawai BKAD sebanyak 25 orang atau 52.08% dan pegawai BAPPENDA sebanyak 23 orang atau 47.92%, sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah pegawai BKAD.

Uji Asumsi Klasik



Gambar 2. Uji Normalitas (P-P Plot)

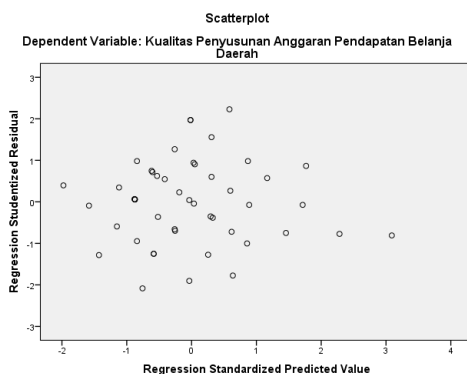
Pada P-Plot di atas menunjukkan bahwa data masih mendekati garis diagonal atau tidak ditemukan adanya kecenderungan data tersebut menyebar menjauhi garis tersebut, sehingga disimpulkan data berdistribusi normal.

Tabel 3. Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov Test)

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.02360869
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.061
	Negative	-.071
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Pada Kolmogorov-Smirnov Test di atas menunjukkan hasil signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0.200 yang lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki data berdistribusi secara normal.



Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)

Pada *scatterplot* di atas menunjukkan penelitian ini tidak mengalami adanya gejala heteroskedastisitas, karena ditemukan bahwa data-data mengalami penyebaran ke segala arah atau tidak ada pola yang terbentuk.

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1 (Constant)		
Sumber Daya Manusia	.738	1.356
Komitmen Organisasi	.846	1.181
Penyempurnaan Sistem Administrasi	.762	1.313

a. Dependent Variable: Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Nilai *tolerance* variabel sumber daya manusia diperoleh sebesar 0.738, komitmen organisasi sebesar 0.846, dan penyempurnaan sistem administrasi sebesar 0.762 yang lebih besar dari 0.10, serta VIF untuk variabel sumber daya manusia diperoleh sebesar 1.356, komitmen organisasi sebesar 1.181, dan penyempurnaan sistem administrasi sebesar 1.313 yang lebih kecil dari 10. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa model regresi penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	.282	2.162	
Sumber Daya Manusia	.375	.138	.308
Komitmen Organisasi	.352	.103	.363
Penyempurnaan Sistem Administrasi	.312	.106	.330

a. Dependent Variable: Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Interpretasi hasil regresi linier berganda di atas, yaitu:

- Jika kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah tidak dipengaruhi oleh variabel apapun akan tetap bernilai 0.282.
- Nilai koefisien regresi sumber daya manusia bernilai positif sebesar 0.375, dengan mengandung arti bahwa kenaikan satu satuan dari sumber daya manusia maka akan dapat meningkatkan kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah sebesar 0.375 satuan.
- Nilai koefisien regresi komitmen organisasi bernilai positif sebesar 0.352, dengan mengandung arti kenaikan satu satuan dari komitmen organisasi maka akan dapat meningkatkan kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah sebesar 0.352 satuan.
- Nilai koefisien regresi penyempurnaan sistem administrasi bernilai positif sebesar 0.312, dengan mengandung arti bahwa kenaikan satu satuan dari penyempurnaan sistem administrasi maka akan meningkatkan kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah sebesar 0.312 satuan.

Uji Hipotesis

Tabel 6. Uji t

Model	t	Sig.
1 (Constant)	.130	.897
Sumber Daya Manusia	2.713	.009
Komitmen Organisasi	3.429	.001
Penyempurnaan Sistem Administrasi	2.955	.005

a. Dependent Variable: Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Interpretasi hasil uji t di atas, yaitu:

- Nilai t_{hitung} sumber daya manusia terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah sebesar 2.713 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 2.015 atau nilai signifikansi t sebesar 0.009 lebih kecil dari nilai alpha (0.05). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, maka dapat dikatakan hipotesis alternatif (H_1) diterima.

- b) Nilai t_{hitung} komitmen organisasi terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah sebesar 3.429 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 2.015 atau nilai signifikansi t sebesar 0.001 lebih kecil dari nilai alpha (0.05). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, maka dapat dikatakan hipotesis alternatif (H_2) diterima.
- c) Nilai t_{hitung} pada penyempurnaan sistem administrasi terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah sebesar 2.955 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 2.015 atau nilai signifikansi t sebesar 0.005 lebih kecil dari nilai alpha (0.05). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan penyempurnaan sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, maka dapat dikatakan hipotesis alternatif (H_3) diterima.

Tabel 7. Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	68.755	3	22.918	20.477	.000 ^b
	Residual	49.245	44	1.119		
	Total	118.000	47			

a. Dependent Variable: Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
 b. Predictors: (Constant), Penyempurnaan Sistem Administrasi, Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia

Nilai F_{hitung} untuk sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan penyempurnaan sistem administrasi terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah sebesar 20.477 lebih besar dari nilai F_{tabel} sebesar 2.820 atau nilai signifikansi F sebesar 0.000 lebih kecil dari nilai alpha (0.05). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan penyempurnaan sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, maka dapat dikatakan hipotesis alternatif (H_4) diterima.

Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.763 ^a	.583	.554	1.05793

a. Predictors: (Constant), Penyempurnaan Sistem Administrasi, Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia
 b. Dependent Variable: Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Hasil R-Square diperoleh sebesar 0.583 atau 58.3% proporsi dari kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah yang dijelaskan oleh sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan penyempurnaan sistem administrasi, sedangkan sisanya 41.7% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Nilai koefisien regresi sumber daya manusia sebesar 0.375 yang berarti bahwa semakin baik sumber daya manusia dalam melaksanakan dan mengelola kepentingan daerah, maka akan semakin mampu dalam memberikan kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah yang semakin tepat. Hal tersebut juga selaras dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, karena nilai t_{hitung} (2.713) > nilai t_{tabel} (2.015) atau nilai signifikansi t (0.009) lebih kecil < α (0.05). Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian dari Harahap & Syardiansah (2021) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas penyusunan APBD.

Nilai koefisien regresi komitmen organisasi sebesar 0.352 yang berarti bahwa semakin baik komitmen organisasi yang terjalin antar aparatur daerah, maka akan semakin mampu dalam memberikan kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah yang semakin baik. Hal tersebut juga selaras dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, karena nilai t_{hitung} (3.429) > nilai t_{tabel} (2.015) atau nilai signifikansi t (0.001) lebih kecil < α (0.05). Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian dari Sewang (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas penyusunan APBD.

Nilai koefisien regresi penyempurnaan sistem administrasi sebesar 0.312 yang berarti bahwa semakin baik penyempurnaan sistem administrasi dalam mencatat maupun mengelola dokumen atau laporan, maka akan semakin mampu untuk mencapai kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah yang semakin baik. Hal tersebut juga selaras dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, karena nilai t_{hitung} (2.955) > nilai t_{tabel} (2.015) atau nilai signifikansi t (0.005) lebih kecil < α (0.05). Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian dari Ismid, dkk (2020) yang menyatakan bahwa penyempurnaan sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, dengan diperoleh nilai t_{hitung} (2.713) > nilai t_{tabel} (2.015) atau nilai signifikansi t (0.009) lebih kecil < α (0.05). Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, dengan diperoleh nilai t_{hitung} (3.429) > nilai t_{tabel} (2.015) atau nilai signifikansi t (0.001) lebih kecil < α (0.05). Penyempurnaan sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, dengan diperoleh nilai t_{hitung} (2.955) > nilai t_{tabel} (2.015) atau nilai signifikansi t (0.005) lebih kecil < α (0.05). Sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan penyempurnaan sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan

belanja daerah, dengan diperoleh nilai F_{hitung} (20.477) > nilai F_{tabel} sebesar 2.820 atau nilai signifikansi F (0.000) < nilai α (0.05).

Saran penelitian ini adalah bagi BKAD dan BAPPENDA Kabupaten Karo dapat terus meningkatkan keahlian maupun kemampuan dari setiap pegawai dengan mengikutsertakan dalam pelatihan dan pengembangan secara berkelanjutan, dan mengupayakan sinergitas antar pegawai dapat terus terjalin, serta sistem administrasi dalam melakukan pencatatan dan pengelolaan setiap dokumen atau laporan disempurnakan secara berkala dengan demikian penyusunan APBD dapat memberikan hasil yang semakin berkualitas. Bagi peneliti berikutnya dapat menambah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas penyusunan APBD, mengingat masih ada 41.7% faktor atau variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel terikat pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Z. 2000. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: BPFE.
- Erlina, et. al., 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Biduri, S. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Jawa Timur: UMSIDA Press.
- Bukit, B., Malusa, T., & Rahmat, A. 2017. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Harahap, A. Y., & Syardiansah, S. 2021. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Transparansi Terhadap Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 1161–1168. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.16532>.
- Hardani, dkk. 2017. Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Ismid, F., Kusmanto, H., & Lubis, M. S. 2020. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 2(2), 129–140.
- Karmanis, & Karjono. 2020. Perkembangan Teori dan Reformasi Administrasi. Jawa Tengah: CV. Pilar Nusantara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah “Belanja Daerah.” Kementerian Keuangan, 51(1), 212.
- Kurniawati, Endah. 2021. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management (NEM).
- Mustika, M. 2018. Pengaruh Penyempurnaan Sistem Administrasi Dan Sanksi Terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Provinsi Jambi. *Journal Development*, 6(2), 168–177.
- Nugraheta, U. R. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Surakarta). Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Purnomo, R. A. 2017. Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS. Ponorogo: CV. Wade Group.
- Rasyid, A., Sari, R. N., & Rasuli, M. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi APBD Berbasis Kinerja (Studi Empiris Pada Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau). 25, No. 4, 14.
- Sewang, F. 2021. Pengaruh Perencanaan, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju. Skripsi Universitas Hasanuddin.
- Sholehah, N. L. H., Ishak, P., & Zulfaidah. 2020. Kecurangan Akuntansi: Ditinjau dari Pengendalian Internal, Moralitas dan Personal Culture. CV AA. Rizky.
- Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Ut. JURNAL MANAJEMEN Open, 6(2), 129–138. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=AjAayn0AAAAJ&citation_for_view=AjAayn0AAAAJ:4T0pqqG69KYC
- Siagian, B. 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Motivasi Sebagai Moderating di Kota Medan. Tesis Universitas Sumatera Utara.
- Simanjuntak, A., Situmorang, C. V., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA), 9(2), 131–142. <https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.2985>
- Siregar, S. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS. Jakarta: Kencana.
- Situmorang, C. V., & Simanjuntak, A. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi, 5(2), 160. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2694>
- Situmorang, C. V., & Simanjuntak, A. (2021). Pengaruh Strategic Management Accounting dalam Memediasi Pengaruh Orientasi Pasar, dan Kualitas Pimpinan terhadap Kinerja Keuangan. JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi, 7(2), 100–108. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.4312>
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sulkarnaim. 2016. Pengaruh Komitmen Organisasi, Penyempurnaan Sistem Administrasi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reward Terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Kabupaten Kepulauan Selayar. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Verawaty, V. 2017. Determinan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui E-Government Pemerintah Daerah Di Sumatera Selatan. Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 13(2), 92–107. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v13i2.172>

Yusuf, R. M., & Syarif, D. 2018. *Komitmen Organisasi*. Makassar: CV Nas Media Pustaka.

Zaenuri, M. 2015. *Manajemen SDM di Pemerintahan*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi & Pengabdian Masyarakat (LP3M).

Pemerintah Kabupaten Karo. 2021. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022*.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.